



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR **162** TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan berpedoman pada Peraturan Wali Kota Batam Nomor 82 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang. . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 242);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan. . .

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), sebagaimana telah dimutakhirkan beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BATAM TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.

3. Rencana. . .

3. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2024, kondisi lingkungan strategis Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan II tahun berjalan.
- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I. PENDAHULUAN;
 - b. BAB II. HASIL EVALUASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN II;
 - c. BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;
 - d. BAB IV. PENUTUP.
- (3) Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan bagian dari Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3. . .

Pasal 3

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 menguraikan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target capaian kinerja, dan pagu indikatif.
- (2) Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan RKA Perangkat Daerah.
- (3) Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar. . .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 5 Agustus 2024

WALI KOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 5 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2024 NOMOR 1502



2024

PERUBAHAN RENCANA KERJA

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KOTA BATAM**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan karuniaNya kita dapat menyusun Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam Tahun 2025.

Dalam rangka mengemban amanah misi ke-5 dari Pemerintah Kota Batam dan untuk mempermudah pelaksanaan kinerja pada tahun 2025, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam menyusun Rencana Kerja Tahun 2025. Rencana Kerja tersebut mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam tahun 2021-2026.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam Tahun 2025 ini, maka diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam selama tahun 2025 dan kiranya dapat memberikan manfaat baik sebagai informasi maupun evaluasi kinerja.

Batam, Agustus 2024



KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SDM KOTA BATAM

Dra. HASNAH

Pembina Utama Muda/IVc

NIP. 19680714 198909 2 001

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI..... i

DAFTAR TABEL ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum..... 4

1.3. Maksud dan Tujuan 6

1.4. Sistematika Penulisan..... 6

BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024..... 8

2.1 Evaluasi Terhadap Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II..... 8

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 37

3.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah 37

3.2. Perubahan Belanja Perangkat Daerah Tahun 2024 39

3.3. Rencana Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan..... 46

BAB IV PENUTUP..... 52

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah
Sampai Triwulan II Tahun 2024.....10

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja.....38

Tabel 3. 2. Perubahan Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun
2024.....40

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Undang-Undang ini merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

Selain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi :

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan kebijakan pembangunan dengan jangka waktu 20 tahun;

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun; dan

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada Pasal 2 menyatakan “ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah terdiri atas : RPJPD, RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD dan Renja Perangkat Daerah”.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang

penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMN. RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Perangkat Daerah, Lintas Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan Perubahan Rencana Kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Sejalan dengan penyusunan RPJMD, Perangkat Daerah juga menyusun dokumen perencanaan jangka menengah yang disebut dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD). Penyusunan Renstra Perangkat Daerah ini mengacu pada RPJMD. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Batam mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan Wali Kota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya. Dengan tugas tersebut, maka Renstra BKPSDM Kota Batam tahun 2021-2026 perlu memperhatikan beberapa ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), antara lain: menciptakan Aparatur Sipil Negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat; menyelenggarakan manajemen aparatur sipil negara berdasarkan pada kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan dengan kompetensi dalam proses rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan; serta mewujudkan Aparatur Sipil Negara sebagai bagian dari Reformasi Birokrasi, yaitu Aparatur Sipil Negara sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi, BKPSDM Kota Batam sebagai salah satu Perangkat Daerah setelah menyusun Renstra maka perlu menyusun Perubahan Rencana Kerja tahunan dalam hal ini Renja BKPSDM Kota Batam tahun

2024.

BKPSDM Kota Batam dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Batam. Pada Peraturan Daerah tersebut dijelaskan bahwa BKPSDM Kota Batam berkedudukan sebagai lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

Tugas Pokok :

BKPSDM Kota Batam mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian dan pendidikan serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan Wali Kota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas pokok, BKPSDM Kota Batam mempunyai fungsi sebagai :

Perumusan kebijakan teknis bidang pengadaan, pemberhentian, informasi dan fasilitasi, bidang mutasi, kepangkatan dan promosi, bidang pembinaan, penilaian kinerja dan penghargaan aparatur dan bidang pengembangan aparatur;

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pengadaan, pemberhentian, informasi dan fasilitasi, bidang mutasi, kepangkatan dan promosi, bidang pembinaan, penilaian kinerja dan penghargaan aparatur dan bidang pengembangan aparatur;

Pembinaan dan pelaksanaan bidang pengadaan, pemberhentian, informasi dan fasilitasi, bidang mutasi, kepangkatan dan promosi, bidang pembinaan, penilaian kinerja dan penghargaan aparatur dan bidang pengembangan aparatur;

Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Badan.

BKPSDM Kota Batam dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara optimal melalui program-program yang telah ditetapkan pada RPJMD Kota Batam, sehingga dapat menyusun target kerja yang akan dicapai dan memudahkan bagi BKPSDM Kota Batam dalam mengukur dan mengevaluasi capaian kinerja yang telah dihasilkan pada tahun sebelumnya dan menargetkan capaian kinerja selanjutnya.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan Perundang-Undangan yang melatar belakangi penyusunan Perubahan Renja BKPSDM Kota Batam tahun 2024 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang

RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026 ;

18. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 76 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026;
19. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 84 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Acara Nomor 1424);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Renja BKPSDM Kota Batam tahun 2024 yaitu ;

1. Memenuhi kebutuhan akan adanya perencanaan strategis sebagai acuan dan pedoman bagi sekretariat dan bidang di lingkungan BKPSDM Kota Batam dalam melaksanakan rencana kegiatan tahunan dalam jangka 1 (satu) tahun 2024;
2. Menyiapkan dokumen Perubahan Renja BKPSDM Kota Batam tahun 2024 dalam rangka penyusunan Perubahan APBD Kota Batam tahun 2024.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja BKPSDM Kota Batam tahun 2024 yaitu:

- 1) Menselaraskan pelaksanaan kegiatan sekretariat dan bidang di lingkungan BKPSDM Kota Batam sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 2) Menentukan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan skala prioritas;
- 3) Adanya kesinambungan antara RPJMD, Renstra BKPSDM dan Renja BKPSDM untuk menunjang pencapaian tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Renja BKPSDM Kota Batam tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

- 2.1 Evaluasi Renja Perangkat Daerah Sampai Triwulan II

Bab III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
3.1	Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah
3.2	Perubahan Belanja Perangkat Daerah Tahun 2024
3.3	Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Bab IV	PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Terhadap Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Perubahan Renja BKPSDM Kota Batam tahun 2024 juga dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Perubahan Renja BKPSDM Kota Batam tahun 2024 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program kegiatan, pelaksanaan rencana program kegiatan dan hasil rencana program kegiatan.

Perubahan Renja BKPSDM Kota Batam tahun 2024, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagaimana berikut:

- 1) Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- 2) Tujuan yang dikehendaki;
- 3) Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- 4) Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana.

Penyusunan Perubahan Renja BKPSDM Kota Batam tahun 2024 juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Hasil evaluasi capaian kinerja triwulan II tahun 2024 sebagai dasar awal dalam penyusunan perencanaan tahun 2024;
- 2) Memperhatikan keberlanjutan (*sustainable development*) untuk menjaga konsistensi pelaksanaan program kegiatan tahun berikutnya dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan organisasi.

Pelaksanaan program dan kegiatan BKPSDM Kota Batam dengan capaian realisasi fisik sampai dengan akhir bulan Juni tahun anggaran 2024 mencapai 50,00 % dan capaian realisasi keuangan sebesar Rp.6.223.866.006,00 atau sebesar 37,78% dari total pagu anggaran Rp. 20.753.873.675,00

Berikut adalah rekapitulasi hasil pelaksanaan Perubahan Renja BKPSDM Kota Batam serta pencapaian Renstra Perangkat Daerah tahun 2024 menurut indikator program dapat dilihat dalam tabel 2.1 sebagai berikut

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Sampai Triwulan II Tahun 2024

N O	KOD E	URUS AN/BI DANG URUS AN PEME RINTA HAN DAER AH/P ROGR AM	INDI KAT OR PRO GRA M	KEG IATA N	INDI KAT OR KEG IATA N	SUB KEGI ATAN RKPD 2024	INDIK ATOR SUB KEGI ATAN	CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENJA TH 2023			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENJA TH 2022			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024			TARGET KINERJA DAN ANGGARA N APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUA SI TAHUN 2024		REALISAS I KINERJA DAN ANGGARA N TAHUN 2024 (PER MARET 2024)		REALISAS I KINERJA DAN ANGGARA N TAHUN 2024 (PER JUNI 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARA N RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUA SI TAHUN 2024		TINGKA T CAPAIA N KINERJ A DAN REALIS ASI ANGGA RAN RENJA 2023		KET ERA NGA N				
								SA T U A N	KI NE RJ A	Rp.	SAT UA N	KI NE RJ A	Rp.	SAT UA N	KI NE RJ A	Rp.	SAT UA N	KI NE RJ A	Rp.	KI NE RJ A	Rp.	KI NE RJ A	Rp.	KI NE RJ A	Rp.	KI NE RJ A	Rp.	KI NE RJ A	Rp.		KI NE RJ A	Rp.	KI NE RJ A	R p
1	2	3	4	5	6	7	7	8			9			10			11			12		13		14		15		16		15				
	5	UNSU R PENU NJAN G URUS AN PEME RINT AHAN								128. 746. 677. 345			14.5 22.2 04.7 20			15.1 16.8 26.1 87			21.1 55.0 97.6 50			20.7 53.9 73.6 75			2.28 6.01 0.42 3			9.00 1.46 4.67 0	0	9.001 .464. 670,0 0	#D IV /0 !	4 3, 3 7		
	5,03	KEPE GAWA IAN								98.7 61.2 07.0 45			13.0 21.7 41.8 04			12.0 50.9 36.6 38			15.6 12.5 35.6 50			15.3 41.5 44.6 75			2.28 6.01 0.42 3			7.17 7.45 0.45 7	58 ,6 5	7.177 .450. 457	#D IV /0 !	4 6, 7 8		
	5.03. 01	PROG RAM PENU NJAN G URUS AN PEME RINT AHAN DAER AH KABU	Pers enta se Terp enuh inya Penu njan g Urus an Pem erint					%	10 0	81.1 94.8 10.0 45	%	10 0	11.8 25.6 60.5 94	%	10 0	11.3 08.6 44.8 65	%	10 0	13.4 28.2 62.6 50	10 0	13.2 06.0 20.6 75	53 ,5 7	2.16 1.73 4.42 3	56 ,1 2	6.70 2.95 0.01 0	56	6.702 .950. 010	56 ,1 2	5 0, 7 6					

NO	KODE	URUSAN/BI DANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGR AM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN RKPD 2024	INDIKATOR SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENJ A TH 2023			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENJ A TH 2022			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024			TARGET KINERJA DAN ANGGARA N APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUA SI TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARA N TAHUN 2024 (PER MARET 2024)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARA N TAHUN 2024 (PER JUNI 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARA N RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUA SI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2023		KET ERAN GAN				
								SATUAN	KINERJA	Rp.	SATUAN	KINERJA	Rp.	SATUAN	KINERJA	Rp.	SATUAN	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.		KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	7	8			9			10			11			12		13		14		15		16		15				
		PATEN/KOTA	ahan Daerah Kabupaten/Kota																															
	5.03.01.2.02			Administrasi Keuangan Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Daerah Yang Terpenuhi			%	100	71.201.007.061	%	100	10.748.540.164	%	100	10.314.864.560	%	100	12.463.171.770	100	12.211.454.505	100	1.996.200.851	81,8	6.435.335.182	81,8	6.435.335.182	81,8	52,70					
	5.03.01.2.02.0001				Penyediaan Gaji dan Tunjangan		Jumlah Orang yang Menerima				Orang/Bulan	53	10.703.600.164	Orang/Bulan	53	10.269.924.560	Orang/Bulan	54	12.410.531.770	54	12.211.454.505	54	1.996.200.851	54	6.435.335.182	54	6.435.335.182	100	52,70					

NO	KODE	URUSAN/BI DANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN RKPD 2024	INDIKATOR SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENJATH 2023			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENJATH 2022			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024 (PER MARET 2024)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024 (PER JUNI 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJATAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJATAH 2023		KET ERANGAN				
								SATUAN	KINERJA	Rp.	SATUAN	KINERJA	Rp.	SATUAN	KINERJA	Rp.	SATUAN	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.		KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	7	8			9			10			11			12		13		14		15		16		15				
						ngan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN																											
	5.03.01.2.02.0003					Pelaksanaan Penat ausahan dan Pengu jian/V erifika si Keuan gan SKPD	Jumla h Doku men Penat ausahan dan Pengu jian/V erifika si Keuan gan SKPD				Dok um en	1	44.940.000	Dok um en	1	44.940.000	Dok um en	12	52.640.000	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	# DI V /0 !				
	5.03.01.2.06			Adm inist rasi Umu m Pera ngka t Daer ah	Pers enta se Peny edia an Admi nistr asi Umu			%	100	5.166.762.832	%	100	480.690.786	%	100	518.780.029	%	100	412.044.000	100	732.953.250	61,54	119.857.664	69,23	170.698.912	69	170.698.912,00	69,23	23,29					

N O	KOD E	URUS AN/BI DANG URUS AN PEME RINTA HAN DAER AH/P ROGR AM	INDI KAT OR PRO GRAM	KEG IATA N	INDI KAT OR KEG IATA N	SUB KEGI ATAN RKPD 2024	INDIK ATOR SUB KEGI ATAN	CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENJA TH 2023			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENJA TH 2022			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024			TARGET KINERJA DAN ANGGARA N APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUA SI TAHUN 2024		REALISAS I KINERJA DAN ANGGARA N TAHUN 2024 (PER MARET 2024)		REALISAS I KINERJA DAN ANGGARA N TAHUN 2024 (PER JUNI 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARA N RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUA SI TAHUN 2024		TINGKA T CAPAIA N KINERJ A DAN REALIS ASI ANGGA RAN RENJA 2023		KET ERA NGA N				
								SA T U A N	KI NE RJ A	Rp.	SAT UA N	KI NE RJ A	Rp.	SAT UA N	KI NE RJ A	Rp.	SAT UA N	KI NE RJ A	Rp.	KI NE RJ A	Rp.	KI NE RJ A	Rp.	KI NE RJ A	Rp.	KI NE RJ A	Rp.	KI NE RJ A	Rp.		KI NE RJ A	Rp.	KI NE RJ A	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	7	8			9			10			11			12		13		14		15		16	15					
					m Pera ngka t Daer ah																													
	5.03. 01.2. 06.00 01					Penye diaan Komp onen Instal asi Listrik /Pene ranga n Bangu nan Kanto r	Jumla h Paket Komp onen Instal asi Listrik /Pene ranga n Bangu nan Kanto r yang Disedi akan				Pak et	1	3.30 0.00 0	Pak et	1	6.08 1.00 0	Pak et	1	3.30 4.00 0	1	3.30 4.00 0	1	2.58 3.70 0	1	2.58 3.70 0	1	2.583 .700, 00	10 0	78 ,2 0					
	5.03. 01.2. 06.00 02					Penye diaan Perala tan dan Perlen gkapa	Jumla h Paket Perala tan dan Perlen				Pak et	3	179. 938. 000	Pak et	3	187. 571. 000	Pak et	4	292. 185. 000	4	278. 968. 500	1	62.9 43.1 01	1	62.9 43.1 01	1	62.94 3.101 ,00	25	22 ,5 6					

NO	KODE	URUSAN/BI DANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN RKPD 2024	INDIKATOR SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENJATH 2023			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENJATH 2022			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024 (PER MARET 2024)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024 (PER JUNI 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2023		KETERANGAN
								SATUAN	KINERJA	Rp.	SATUAN	KINERJA	Rp.	SATUAN	KINERJA	Rp.	SATUAN	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	7	8			9			10			11			12		13		14		15		16	15	
						n Kantor	gkapa Kantor yang Disedi akan																							
	5.03.01.2.06.0004					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disedi akan				Paket	2	6.221.000	Paket	2	5.783.200	Paket	1	6.677.000	1	14.677.000	1	8.894.200	1	9.594.200	1	8.894.200,00	100	60,60	
	5.03.01.2.06.0005					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disedi akan				Paket	1	46.040.125	Paket	1	48.661.300	Paket	2	66.679.000	2	59.923.750	1	25.195.750	1	25.195.750	1	25.195.750,00	50	42,05	

NO	KODE	URUSAN/BI DANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN RKPD 2024	INDIKATOR SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENJATH 2023			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENJATH 2022			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJATAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024 (PER MARET 2024)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024 (PER JUNI 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJATAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJATAH 2023		KETERANGAN
								SATUAN	KINERJA	Rp.	SATUAN	KINERJA	Rp.	SATUAN	KINERJA	Rp.	SATUAN	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	7	8			9			10			11			12		13		14		15		16		15
	5.03.01.2.06.0006					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				Dokumen	2	5.040.000	Dokumen	2	5.000.000	Dokumen	2	7.200.000	2	7.200.000	2	1.260.000	2	2.520.000	2	1.260.000	100	17,50	
	5.03.01.2.06.0008					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				Laporan	1	8.280.000	Laporan	1		Laporan	1	9.000.000	1	9.000.000	0	0	1	2.880.000	0	0,00	0	0,00	
	5.03.01.2.06.0009					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi				Laporan	1	231.871.661	Laporan	1	265.683.529	Laporan	2	329.688.000	2	359.880.000	2	18.980.913	2	64.982.161	2	18.980.913	100	5,27	

NO	KODE	URUSAN/BI DANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGR AM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN RKPD 2024	INDIKATOR SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENJ TH 2023			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENJ TH 2022			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024			TARGET KINERJA DAN ANGGARA N APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUA SI TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARA N TAHUN 2024 (PER MARET 2024)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARA N TAHUN 2024 (PER JUNI 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARA N RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUA SI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2023		KETERANGAN				
								SATUAN	KINERJA A	Rp.	SATUAN	KINERJA A	Rp.	SATUAN	KINERJA A	Rp.	SATUAN	KINERJA A	Rp.	KINERJA A	Rp.	KINERJA A	Rp.	KINERJA A	Rp.	KINERJA A	Rp.	KINERJA A	Rp.		KINERJA A	Rp.	KINERJA A	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	7	8			9			10			11			12		13		14		15		16		15				
						nasi dan Konsultasi SKPD	enggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																											
	5.03.01.2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah			%	100	2.944.182.000	Pket	100	293.960.000	%	100	193.800.000	%	0,00	266.734.000	100	10.725.000	0	0	0,00	0	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00					

NO	KODE	URUSAN/BI DANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGR	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN RKPD 2024	INDIKATOR SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENJATH 2023			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENJATH 2022			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024 (PER MARET 2024)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024 (PER JUNI 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2023		KETERANGAN
								SATUAN	KINERJA	Rp.	SATUAN	KINERJA	Rp.	SATUAN	KINERJA	Rp.	SATUAN	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	7	8			9			10			11			12		13		14		15		16		15
					Yang Diadakan																									
	5.03.01.2.07.0001					Pengadaan Mebel	Jumlah Pekerjaan Mebel yang Diselesaikan	Unit	0	0,00	Unit	0	0,00	Unit	0	0,00	Unit	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!	0,00	
	5.03.01.2.07.0006					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				Unit	28	293.960.000	Unit	28	193.800.000	Unit	15	266.734.000		10.725.000	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
	5.03.01.2.08			Penyediaan Jasa Penunjang	Persentase Penyediaan Jasa			%	100	566.294.752	%	100	91.198.744	%	100	86.888.176	%	100	143.302.880	100	90.837.920	100	20.600.908	100	34.547.616	100	34.547.616,00	100	38,03	

N O	KOD E	URUS AN/BI DANG URUS AN PEME RINTA HAN DAER AH/P ROGR AM	INDI KAT OR PRO GRAM	KEG IATA N	INDI KAT OR KEG IATA N	SUB KEGI ATAN RKPD 2024	INDIK ATOR SUB KEGI ATAN	CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENJA TH 2023			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENJA TH 2022			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024			TARGET KINERJA DAN ANGGARA N APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUA SI TAHUN 2024		REALISAS I KINERJA DAN ANGGARA N TAHUN 2024 (PER MARET 2024)		REALISAS I KINERJA DAN ANGGARA N TAHUN 2024 (PER JUNI 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARA N RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUA SI TAHUN 2024		TINGKA T CAPAIA N KINERJ A DAN REALIS ASI ANGGA RAN RENJA 2023		KET ERA NGA N				
								SA T U A N	KI NE RJ A	Rp.	SAT UA N	KI NE RJ A	Rp.	SAT UA N	KI NE RJ A	Rp.	SAT UA N	KI NE RJ A	Rp.	KI NE RJ A	Rp.	KI NE RJ A	Rp.	KI NE RJ A	Rp.	KI NE RJ A	Rp.	KI NE RJ A	Rp.		KI NE RJ A	Rp.	KI NE RJ A	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	7	8			9			10			11			12		13		14		15		16		15				
				Uru san Pem erint aha n Daer ah	Penu njan g Urus an Pem erint ahan Daer ah																													
	5.03. 01.2. 08.00 01					Penye diaan Jasa Surat Meny urat	Jumla h Lapor an Penye diaan Jasa Surat Meny urat				Lap ora n	1	5.22 3.31 2	Lap ora n	1	3.17 4.00 0	Lap ora n	1	11.9 16.0 00	1	1.08 0.00 0	1	246. 000	1	408. 000	1	408.0 00,00	10 0	37 ,7 8					
	5.03. 01.2. 08.00 04					Penye diaan Jasa Pelaya nan Umu m Kanto r	Jumla h Lapor an Penye diaan Jasa Pelaya nan Umu				Lap ora n	1	85.9 75.4 32	Lap ora n	1	83.7 14.1 76	Lap ora n	2	131. 386. 880	2	89.7 57.9 20	2	20.3 54.9 08	2	34.1 39.6 16	2	34.13 9.616 ,00	10 0	38 ,0 4					

NO	KODE	URUSAN/BI DANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN RKPD 2024	INDIKATOR SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENJATH 2023			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENJATH 2022			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024 (PER MARET 2024)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024 (PER JUNI 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJATAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2023		KET ERANGAN				
								SATUAN	KINERJA	Rp.	SATUAN	KINERJA	Rp.	SATUAN	KINERJA	Rp.	SATUAN	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.		KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	7	8			9			10			11			12		13		14		15		16		15				
							m Kantor yang Disediakan																											
	5.03.01.2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana			%	100	1.316.563.400	%	100	211.270.900	%	100	194.312.100	%	100	143.010.000	100	160.050.000	6,33	25.075.000	53,25	62.368.300	53,25	62.368.300,00	53,25	38,97					

NO	KODE	URUSAN/BI DANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN RKPD 2024	INDIKATOR SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENJATH 2023			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENJATH 2022			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024 (PER MARET 2024)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024 (PER JUNI 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJATAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2023		KETERANGAN				
								SATUAN	KINERJA	Rp.	SATUAN	KINERJA	Rp.	SATUAN	KINERJA	Rp.	SATUAN	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.		KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	7	8			9			10			11			12		13		14		15		16		15				
	5.03.01.2.09.0001					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan yang Dipelihara atau dibayarkan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang Dipelihara atau dibayarkan Dinas Jabatan				Unit	1	38.836.500	Unit	1	27.558.500	Unit	1	39.780.000	1	39.780.000	1	2.000.000	1	15.304.500	1	15.304.500	100	38,47					
	5.03.01.2.09.0002					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau				Unit	4	135.321.400	Unit	4	132.233.600	Unit	4	104.250.000	4	104.250.000	4	23.075.000	4	39.502.800	4	39.502.800	100	37,89					

NO	KODE	URUSAN/BI DANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN RKPD 2024	INDIKATOR SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENJATH 2023			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENJATH 2022			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024 (PER MARET 2024)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024 (PER JUNI 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2023		KET ERANGAN				
								SATUAN	KINERJA	Rp.	SATUAN	KINERJA	Rp.	SATUAN	KINERJA	Rp.	SATUAN	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.		KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	7	8			9			10			11			12		13		14		15		16		15				
						haraan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizannya																											
	5.03.01.2.09.0006					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				Unit	57	37.113.000	Unit	57	34.520.000	Unit	72	38.760.000	0	16.020.000	0	0	36	7.561.000,00	36	7.561.000,00	50,00	47,20					
	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN	Persentase Pemutak					%	93,15	10.373.301.000	%	91,35	596.938.889	%	91,35	547.047.930	%	91,95	1.373.162.000	91,95	1.195.592.000	98,99	29.776.000	98,99	182.836.400	98,99	182.836.400,00	107,66	115,29					

NO	KODE	URUSAN/BI DANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN RKPD 2024	INDIKATOR SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENJATH 2023			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENJATH 2022			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024 (PER MARET 2024)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024 (PER JUNI 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJATAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2023		KET ERANGAN				
								SATUAN	KINERJA	Rp.	SATUAN	KINERJA	Rp.	SATUAN	KINERJA	Rp.	SATUAN	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.		KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	7	8			9			10			11			12		13		14		15		16		15				
		DAERAH (1)	hiran Data ASN dan Data Pempatan ASN																															
	5.03.02.2.01			Pengadaan, Pemberhentan dan Informati Kepegawaian ASN	Persentase ASN Yang Telah Memutakhirkan Data Kepegawaian			%	89,50	6.904.725.000	%	85,50	350.727.889	%	85,50	250.455.461	%	87,50	968.573.000	87,50	791.003.000	100	28.176.000	100	113.485.000	100	113.485.000	114,29	14,35					
	5.03.02.2.01.002					Penyusunan Rencana Kebutuhan,	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan				Dokumen	10	249.902.000	Dokumen	10	167.671.000	Dokumen	1	968.573.000	1	646.923.000	1	28.176.000	1	78.696.000	1	78.696.000	100	12,16					

NO	KODE	URUSAN/BI DANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN RKPD 2024	INDIKATOR SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENJATH 2023			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENJATH 2022			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024 (PER MARET 2024)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024 (PER JUNI 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJATAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2023		KETERANGAN				
								SATUAN	KINERJA	Rp.	SATUAN	KINERJA	Rp.	SATUAN	KINERJA	Rp.	SATUAN	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.		KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	7	8			9			10			11			12		13		14		15		16		15				
						Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	sunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN																											
	5.03.02.2.01.0010					Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepeg				Dokumen	1	100.825.889	Dokumen	1	82.784.461	Dokumen	1	144.080.000	1	144.080.000	0	0,00	0	34.789.000,00	0	34.789.000,00	0	24,15					

NO	KODE	URUSAN/BI DANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN RKPD 2024	INDIKATOR SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENJATH 2023			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENJATH 2022			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024 (PER MARET 2024)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024 (PER JUNI 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2023		KETERANGAN				
								SATUAN	KINERJA	Rp.	SATUAN	KINERJA	Rp.	SATUAN	KINERJA	Rp.	SATUAN	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.		KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	7	8			9			10			11			12		13		14		15		16		15				
							awaiain																											
	5.03.02.2.02			Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Penerimaan ASN Sesuai Dengan Kompetensi nya			%	96,80	3.468.576.000	%	95,60	246.211.000	%	95,60	296.592.469	%	96,40	404.589.000	96,40	404.589.000	97,98	1.600.000	97,98	69.351.400	97,98	69.351.400	101,64	17,14					
	5.03.02.2.02.0001					Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan				Dokumen	1	15.350.000	Dokumen	1	13.750.000	Dokumen	2	15.755.000	2	15.755.000	1	1.600.000	1	2.400.000	1	2.400.000	50	15,23					

N O	KOD E	URUS AN/BI DANG URUS AN PEME RINTA HAN DAER AH/P ROGR AM	INDI KAT OR PRO GRAM	KEG IATA N	INDI KAT OR KEG IATA N	SUB KEGI ATAN RKPD 2024	INDIK ATOR SUB KEGI ATAN	CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENJA TH 2023			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENJA TH 2022			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024			TARGET KINERJA DAN ANGGARA N APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUA SI TAHUN 2024		REALISAS I KINERJA DAN ANGGARA N TAHUN 2024 (PER MARET 2024)		REALISAS I KINERJA DAN ANGGARA N TAHUN 2024 (PER JUNI 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARA N RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUA SI TAHUN 2024		TINGKA T CAPAIA N KINERJ A DAN REALIS ASI ANGGA RAN RENJA 2023		KET ERA NGA N				
								SA T U A N	KI NE RJ A	Rp.	SAT UA N	KI NE RJ A	Rp.	SAT UA N	KI NE RJ A	Rp.	SAT UA N	KI NE RJ A	Rp.	KI NE RJ A	Rp.	KI NE RJ A	Rp.	KI NE RJ A	Rp.	KI NE RJ A	Rp.	KI NE RJ A	Rp.		KI NE RJ A	Rp.	KI NE RJ A	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	7	8			9			10			11			12		13		14		15		16		15				
							Tinggi , Jabat an Admin istrasi , Jabat an Pelaks ana dan Mutas i ASN antar Daera h																											
	5.03. 02.2. 02.00 02					Pengel olaan Kenai kan Pangk at ASN	Jumla h Pengel olaan Kenai kan Pangk at ASN				Dok um en	2	59.8 41.0 00	Dok um en	2	62.9 01.0 00	Dok um en	2	137. 761. 000	2	137. 761. 000	0	0	2	50.0 31.4 00	2	50.03 1.400	10 0	36 ,3 2					
	5.03. 02.2. 02.00 03					Pengel olaan Promo si ASN	Jumla h Doku men				Dok um en	1	171. 020. 000	Dok um en	1	219. 941. 469	Dok um en	5	251. 073. 000	5	251. 073. 000	0	0	5	16.9 20.0 00	5	16.92 0.000	10 0	6, 74					

N O	KOD E	URUS AN/BI DANG URUS AN PEME RINTA HAN DAER AH/P ROGR AM	INDI KAT OR PRO GRA M	KEG IATA N	INDI KAT OR KEG IATA N	SUB KEGI ATAN RKPD 2024	INDIK ATOR SUB KEGI ATAN	CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENJA TH 2023			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENJA TH 2022			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024			TARGET KINERJA DAN ANGGARA N APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUA SI TAHUN 2024		REALISAS I KINERJA DAN ANGGARA N TAHUN 2024 (PER MARET 2024)		REALISAS I KINERJA DAN ANGGARA N TAHUN 2024 (PER JUNI 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARA N RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUA SI TAHUN 2024		TINGKA T CAPAIA N KINERJ A DAN REALIS ASI ANGGA RAN RENJA 2023		KET ERA NGA N				
								SA T U A N	KI NE RJ A	Rp.	SAT UA N	KI NE RJ A	Rp.	SAT UA N	KI NE RJ A	Rp.	SAT UA N	KI NE RJ A	Rp.	KI NE RJ A	Rp.	KI NE RJ A	Rp.	KI NE RJ A	Rp.	KI NE RJ A	Rp.	KI NE RJ A	Rp.		KI NE RJ A	Rp.	KI NE RJ A	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	7	8			9			10			11			12		13		14		15		16		15				
							Hasil Pengel olaan Promo si ASN																											
	5.03. 02	PROG RAM KEPE GAWA IAN DAER AH (2)	Pers enta se Kasu s Disip lin ASN Yang Ditin dakl anjut i					%	10 0	1.43 1.81 2.00 0	%	10 0	295. 964. 321	%	10 0	75.2 43.8 43	%	10 0	305. 908. 000	10 0	304. 932. 000	0, 00	0	0, 00	59.0 04.0 47		59.00 4.047	0	1 9, 3 5					
	5.03. 02.2. 04			Penil aian dan Eval uasi Kine rja Apar atur	Juml ah ASN Yang Mem enuh i Penil aian Kine rja			Or an g	5. 50 0	1.431 .812. 000	Oran g	5. 65 6	295. 964. 321	Oran g	5. 65 6	75.2 43.8 43	Oran g	5. 50 0	305. 908. 000	5. 50 0	304. 932. 000	0	0	0	59.0 04.0 47	0	59.00 4.047	0	19 ,3 5					

NO	KODE	URUSAN/BI DANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN RKPD 2024	INDIKATOR SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENJATH 2023			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENJATH 2022			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024 (PER MARET 2024)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024 (PER JUNI 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJATAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJATAH 2023		KETERANGAN				
								SATUAN	KINERJA	Rp.	SATUAN	KINERJA	Rp.	SATUAN	KINERJA	Rp.	SATUAN	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.		KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	7	8			9			10			11			12		13		14		15		16		15				
					Persentase Kasus Disiplin ASN Yang Diselenggarakan			%	82,33		%	77,83		%	77,83			79,33		79,33		0,00		0,00		0		0		0	#DIV/0!			
	5.03.02.2.04.0003					Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				Dokumen	1	31.076.321	Dokumen	1	31.365.815	Dokumen	1	51.898.000	1	51.898.000	0	0,00	0	44.844.047,00	0	0,00	0	0,00					

NO	KODE	URUSAN/BI DANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGR	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN RKPD 2024	INDIKATOR SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENJATH 2023			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENJATH 2022			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024 (PER MARET 2024)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024 (PER JUNI 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2023		KETERANGAN
								SATUAN	KINERJA	Rp.	SATUAN	KINERJA	Rp.	SATUAN	KINERJA	Rp.	SATUAN	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	7	8			9			10			11			12		13		14		15		16		15
	5.03.02.2.04.0004					Pengelolaan Pembelian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				Orang	30	209.728.000	Orang	30	8.030.0000	Orang	18	198.006.000	18	197.030.000	0	0	18	1.920.000,00	0	0,00	0	0,00	
	5.03.02.2.04.0007					Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				Orang	55	55.160.000	Orang	55	35.848.028	Orang	55	56.004.000	55	56.004.000	0	0	55	12.240.000	0	0,00	0	0,00	
	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH (3)	Persentase ASN Yang Memiliki Kualifikasi Pend					%	73,17	5.761.284.000			303.178.000			120.000.000	%	72,90	505.203.000	72,90	635.000.000	79,49	94.500.000	79,49	232.660.000	79,49	232.660.000	109,04	36,64	

N O	KOD E	URUS AN/BI DANG URUS AN PEME RINTA HAN DAER AH/P ROGR AM	INDI KAT OR PRO GRAM	KEGI ATA N	INDI KAT OR KEGI ATA N	SUB KEGI ATAN RKPD 2024	INDIK ATOR SUB KEGI ATAN	CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENJA TH 2023			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENJA TH 2022			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024			TARGET KINERJA DAN ANGGARA N APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUA SI TAHUN 2024		REALISAS I KINERJA DAN ANGGARA N TAHUN 2024 (PER MARET 2024)		REALISAS I KINERJA DAN ANGGARA N TAHUN 2024 (PER JUNI 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARA N RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUA SI TAHUN 2024		TINGKA T CAPAIA N KINERJ A DAN REALIS ASI ANGGA RAN RENJA 2023		KET ERA NGA N
								SAT T UA N	KI NE RJ A	Rp.	SAT UA N	KI NE RJ A	Rp.	SAT UA N	KI NE RJ A	Rp.	SAT UA N	KI NE RJ A	Rp.	KI NE RJ A	Rp.	KI NE RJ A	Rp.	KI NE RJ A	Rp.	KI NE RJ A	Rp.	KI NE RJ A	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	7	8			9			10			11			12		13		14		15		16		15
			idika n D- IV/S- 1 Ke Atas																											
	5.03. 02.2. 03			Peng emb anga n Kom pete nsi ASN	Juml ah ASN Berk ualifi kasi D- IV/S 1-S2			Or an g	3. 83 2	5.761 .284. 000			303. 178. 000			120. 000. 000	Ora ng	4. 21 3	505. 203. 000	4. 21 3	635. 000. 000	4. 23 4	94.5 00.0 00	4. 23 4	232. 660. 000	4. 23 4	232.6 60.00 0	10 0, 50	36 ,6 4	
					Juml ah ASN Yang Mem enuh i Kom pete nsi			Or an g	3. 25 2		Ora ng			Ora ng			Ora ng	2. 94 4		2. 94 4		6. 79 9		6. 79 9		6. 79 9		23 0, 94		
	5.03. 02.2. 03.00 02					Pengel olaan Asses sment Cente r	Jumla h Doku men Pengel olaan				Dok um en	5	223. 178. 000	Dok um en	5	0,00	Dok um en	5	253. 203. 000	5	260. 000. 000	0	0	5	138. 160. 000	0	0,00	0	0, 00	

NO	KODE	URUSAN/BI DANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN RKPD 2024	INDIKATOR SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENJATH 2023			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENJATH 2022			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024 (PER MARET 2024)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024 (PER JUNI 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJATAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJATAH 2023		KET ERANGA N				
								SATUAN	KINERJA	Rp.	SATUAN	KINERJA	Rp.	SATUAN	KINERJA	Rp.	SATUAN	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.		KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	7	8			9			10			11			12		13		14		15		16		15				
							Assesment Center																											
	5.03.02.2.03.0004					Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				Orang	5	80.000.000	Orang	5	120.000.000	Orang	5	252.000.000	5	375.000.000	5	94.500.000	5	94.500.000	5	94.500.000	100	25,20					
	5,04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								29.985.470.300			1.500.462.916			3.065.889.549			5.542.562.000		5.412.429.000		0		1.824.014.213	0	1.824.014.213	#DIV/0!	33,70					

NO	KODE	URUSAN/BI DANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN RKPD 2024	INDIKATOR SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENJATH 2023			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENJATH 2022			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJATAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024 (PER MARET 2024)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024 (PER JUNI 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJATAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJATAHUN 2023		KETERANGAN
								SATUAN	KINERJA	Rp.	SATUAN	KINERJA	Rp.	SATUAN	KINERJA	Rp.	SATUAN	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	7	8			9			10			11			12		13		14		15		16		15
	5.04.02	PROGRAM PENGEMBA NGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Pegawai Yang Memiliki Sertifikasi Sesuai Dengan Jabatan Dan Kompetensi nya					%	76,45	29.985.470.300	%	65,59	1.500.462.916	%	65,59	3.065.889.549	%	69,21	5.542.562.000	69,21	5.412.429.000	0	0	33,7	1.824.014.213	33,70	1.824.014.213	48,69	3,70	
	5.04.02.2.01		Pengembangan Kompetensi	Persentase ASN Yang Mengikuti				%	15,00	3.307.310.300	%	12,00	699.715.848	%	12,00	676.235.593	%	13,00	983.826.000	13,00	1.565.813.000	0,00	0	0,00	376.480.816	0,00	376.480.816	0	24,04	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN RKPD 2024	INDIKATOR SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENJATH 2023			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENJATH 2022			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024 (PER MARET 2024)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024 (PER JUNI 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2023		KETERANGAN
								SATUAN	KINERJA	Rp.	SATUAN	KINERJA	Rp.	SATUAN	KINERJA	Rp.	SATUAN	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	7	8			9			10			11			12		13		14		15		16	15	
				Teknis	Diklat Teknis Dan Fungsional																									
	5.04.02.2.01.0003					Penyelenggaraan Penganbangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara	Jumlah ASN yang Mengikuti Penganbangan Kompetensi				Orang	568	699.715.848	Orang	568	676.235.593	Orang	400	983.826.000	400	1.565.813.000	0	0	301	376.480.816	301	376.480.816	75,25	24,04	

NO	KODE	URUSAN/BI DANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN RKPD 2024	INDIKATOR SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENJATH 2023			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENJATH 2022			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024 (PER MARET 2024)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024 (PER JUNI 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2023		KETERANGAN
								SATUAN	KINERJA	Rp.	SATUAN	KINERJA	Rp.	SATUAN	KINERJA	Rp.	SATUAN	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	7	8			9			10			11			12		13		14		15		16		15
						Urusan Pemerintahan Konku ren, Peran gkat Daerah Penun jang, dan Urusa n Pemer intaha n Umu m																								
	5.04.02.2.02			Sertifikasi, Kelembagaan, Pengemb	Persentase ASN Yang Memenuhi Syar			%	63,53	26.678.160.000	%	49,66	800.747.068	%	49,66	2.389.653.956	%	54,28	4.558.736.000	54,28	3.846.616.000	26,30	0,00	37,80	1.447.533.397	26	1.447.533.397	48,45	37,63	

N O	KOD E	URUS AN/BI DANG URUS AN PEME RINTA HAN DAER AH/P ROGR AM	INDI KAT OR PRO GRA M	KEG IATA N	INDI KAT OR KEG IATA N	SUB KEGI ATAN RKPD 2024	INDIK ATOR SUB KEGI ATAN	CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENJA TH 2023			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENJA TH 2022			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024			TARGET KINERJA DAN ANGGARA N APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUA SI TAHUN 2024		REALISAS I KINERJA DAN ANGGARA N TAHUN 2024 (PER MARET 2024)		REALISAS I KINERJA DAN ANGGARA N TAHUN 2024 (PER JUNI 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARA N RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUA SI TAHUN 2024		TINGKA T CAPAIA N KINERJ A DAN REALIS ASI ANGGA RAN RENJA 2023		KET ERA NGA N				
								SA T U A N	KI NE RJ A	Rp.	SAT UA N	KI NE RJ A	Rp.	SAT UA N	KI NE RJ A	Rp.	SAT UA N	KI NE RJ A	Rp.	KI NE RJ A	Rp.	KI NE RJ A	Rp.	KI NE RJ A	Rp.	KI NE RJ A	Rp.	KI NE RJ A	Rp.		KI NE RJ A	Rp.	KI NE RJ A	R p
1	2	3	4	5	6	7	7	8			9			10			11			12		13		14		15		16	15					
				angan Kom pete nsi Man ajeri al dan Fun gsio nal	at Kual ifika si Jaba tan																													
					Pers enta se Pem enuh an Dikl atsar CPN S			%	10 0		%	10 0		%	10 0		%	10 0		10 0		0, 00		0, 00		0		0						
	5.04. 02.2. 02.00 07					Penyel engga raan Penge mban gan Komp etensi	Jumla h Lapor an Hasil Penyel engga raan				Lap ora n	2	800. 747. 068	Lap ora n	2	2.38 9.65 3.95 6	Lap ora n	2	4.55 8.73 6.00 0	2	3.84 6.61 6.00 0	0	0,00	2	1.44 7.53 3.39 7	2	1.447 .533. 397	10 0	37 ,6 3					

N O	KOD E	URUS AN/BI DANG URUS AN PEME RINTA HAN DAER AH/P ROGR AM	INDI KAT OR PRO GRAM	KEG IATA N	INDI KAT OR KEG IATA N	SUB KEGI ATAN RKPD 2024	INDIK ATOR SUB KEGI ATAN	CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENJA TH 2023			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENJA TH 2022			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024			TARGET KINERJA DAN ANGGARA N APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUA SI TAHUN 2024		REALISAS I KINERJA DAN ANGGARA N TAHUN 2024 (PER MARET 2024)		REALISAS I KINERJA DAN ANGGARA N TAHUN 2024 (PER JUNI 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARA N RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUA SI TAHUN 2024		TINGKA T CAPAIA N KINERJ A DAN REALIS ASI ANGGA RAN RENJA 2023		KET ERA NGA N				
								SA T U A N	KI NE RJ A	Rp.	SAT UA N	KI NE RJ A	Rp.	SAT UA N	KI NE RJ A	Rp.	SAT UA N	KI NE RJ A	Rp.	KI NE RJ A	Rp.	KI NE RJ A	Rp.	KI NE RJ A	Rp.	KI NE RJ A	Rp.	KI NE RJ A	Rp.		KI NE RJ A	Rp.	KI NE RJ A	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	7	8			9			10			11			12		13		14		15		16		15				
						bagi Pimpi nan Daera h, Jabat an Pimpi nan Tinggi , Jabat an Fungs ional, Kepe mimpi nan, dan Prajab atan	Penge mban gan Komp etensi bagi Pimpi nan Daera h, Jabat an Pimpi nan Tinggi , Jabat an Fungs ional, Kepe mimpi nan, dan Prajab atan																											
TOTAL										128. 746. 677. 345			14.5 22.2 04.7 20			15.1 16.8 26.1 87			21.1 55.0 97.6 50			20.7 53.9 73.6 75			2.28 6.01 0.42 3			9.00 1.46 4.67 0			9.001 .464. 670,0 0			

Dari tabel di atas dapat dijelaskan hasil pelaksanaan Program dan kegiatan pada BKPSDM Kota Batam dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah hingga triwulan II tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Realisasi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Program ini terdiri dari 5 (lima) kegiatan, yaitu kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota tahun 2024 target kinerja dan Anggaran APBD tahun berjalan yang dievaluasi tahun 2024 sebesar Rp. 13,206,020,650.00 baru terealisasi di triwulan II tahun 2024 sebesar Rp. 6,702,950,010.00 atau 56,12%.
2. Realisasi Program Kepegawaian Daerah.
Program ini terdiri dari 4 Kegiatan, yaitu kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN, kegiatan Mutasi dan Promosi ASN, kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN dan kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur. Program Kepegawaian Daerah tahun 2024 target kinerja dan Anggaran APBD tahun berjalan yang dievaluasi tahun 2024 sebesar sebesar Rp. 2,135,524,000.00 baru terealisasi di triwulan II tahun 2023 sebesar Rp. 474,500,447.00 atau 59,49%.
3. Realisasi Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.
Program ini terdiri dari 2 kegiatan, yaitu kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis dan kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2024 target kinerja dan Anggaran APBD tahun berjalan yang dievaluasi tahun 2024 sebesar sebesar Rp. 5,412,429,000.00 baru terealisasi di triwulan II tahun sebesar Rp. 1,824,014,213.00 atau 33,70%.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target dapat merupakan ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan bersifat lebih konkrit dari pada misi dan mengarah pada suatu titik terang pencapaian hasil. Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi di masa yang akan datang. Dengan demikian tujuan merupakan penjabaran secara lebih nyata dari perumusan visi dan misi yang unik dan idealistik berdasarkan atas visi dan misi yang telah dijelaskan sebelumnya, maka tujuan yang hendak dicapai oleh BKPSDM Kota Batam adalah

“Meningkatkan Profesionalitas Aparatur Sipil Negara” dengan indikator tujuan :

“Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara”

Penjelasan dari tujuan dan indikator tujuan Perubahan Renja BKPSDM Kota Batam tersebut dapat memberikan pemahaman sebagai berikut :

- 1) **Meningkatkan** adalah suatu keinginan untuk menaikkan kemampuan yang dimiliki oleh Aparatur Sipil Negara.
- 2) **Profesionalitas**, mengandung pengertian kualitas sikap anggota suatu profesi serta derajat pengetahuan dan keahlian yang dimiliki untuk dapat melakukan tugas-pekerjaan sesuai standar dan persyaratan yang ditentukan.
- 3) **Aparatur Sipil Negara** yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah yang melaksanakan lembaga ketatalaksanaan yang mempunyai tanggungjawab dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam melayani masyarakat.
- 4) **Indeks**, adalah suatu ukuran statistik yang menunjukkan perubahan suatu variabel atau sekumpulan variabel yang berhubungan satu sama lain, baik pada waktu atau tempat yang sama atau berlainan.

Untuk mewujudkan tujuan “Meningkatkan Profesionalitas Aparatur Sipil Negara” yang akan dicapai oleh BKPSDM Kota Batam, maka terdapat 3 (tiga) Sasaran yang akan mendukung untuk pencapaian tujuan jangka menengah BKPSDM Kota Batam dalam kurun 5 (lima) tahun ke depan, yaitu

- 1) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepegawaian. Pencapaian sasaran ini ditandai dengan indikator “Persentase Penyelesaian Pelayanan Informasi Kepegawaian”.

- 2) Meningkatnya Kinerja dan Kedisiplinan ASN dalam Menunjang Penyelenggaraan Pemerintahan. Pencapaian sasaran ini ditandai dengan indikator “Persentase Peningkatan Kinerja dan Disiplin ASN”.
- 3) Meningkatnya Kapasitas, Kompetensi, dan Kapabilitas ASN dalam Menunjang Penyelenggaraan Pemerintahan. Pencapaian sasaran ini ditandai dengan indikator “Persentase ASN yang Memenuhi Kualifikasi dan Kompetensi ASN”.

Berikut disampaikan Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja BKPSDM Kota Batam tahun anggaran 2024 pada tabel 3.1.

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan Profesionalitas Aparatur Sipil Negara		Indeks Profesionalitas ASN	51,99	55,49	60,00	62,00	64,00	66,00
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepegawaian	Persentase Penyelesaian Pelayanan Kinerja dan Disiplin ASN	97,84 %	98,00 %	98,30 %	98,60 %	98,80 %	99,00 %
		Meningkatnya Kinerja dan Kedisiplinan ASN dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Peningkatan Kinerja dan Disiplin ASN	30,01 %	30,11 %	30,16 %	30,21 %	30,26 %	30,31 %
		Meningkatnya Kapasitas, Kompetensi, dan Kapabilitas ASN Dalam Menunjang Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase ASN yang Memenuhi Kualifikasi dan Kompetensi ASN	21,98 %	25,38 %	29,84 %	31,79 %	33,74 %	35,69 %

3.2. Perubahan Belanja Perangkat Daerah Tahun 2024

Perubahan Rencana Kerja merupakan suatu hal penting bagi terselenggaranya suatu kegiatan. Kedudukan perencanaan kinerja merupakan isu strategis yang harus diperhatikan dan dipecahkan oleh pimpinan instansi yang akan mengarahkan instansinya kepada pelaksanaan misi dan pencapaian misi organisasi. Perubahan Rencana Kerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Sebagai bagian dari manajemen kinerja yang baik, perencanaan kinerja memerlukan pemikiran yang keras untuk menyelaraskan berbagai hal yang telah dituangkan dalam rencana strategis dan kemungkinan pelaksanaannya. Perubahan Rencana Kerja yang baik haruslah selaras dan terintegrasi dengan penataan program dalam organisasi dan perencanaan kegiatan di tingkat pelaksana.

Berikut disampaikan Perubahan Belanja BKPSDM Kota Batam tahun 2024 pada tabel 3.2 di bawah :

Tabel 3. 2. Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2024
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam

NO.	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)/ SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		RENJA 2024	RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA 2024		RENJA 2024	RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA 2024	RENJA 2024	RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						20.836.384.650	21.700.841.375	
	BIDANG URUSAN KEPEGAWAIAN						16.293.822.650	16.435.072.375	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terpenuhi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	13.805.447.150	14.268.493.375	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100%	100%	12.463.171.770	12.928.720.485	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54 Orang	54 Orang	12.410.531.770	12.928.720.485	Penyesuaian pembayaran komponen gaji dan TPP sampai bulan Desember 2024
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen	52.640.000	0	
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	714.733.000	816.165.250	

NO.	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)/ SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		RENJA 2024	RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA 2024		RENJA 2024	RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA 2024	RENJA 2024	RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	3.304.000	3.304.000	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	292.185.000	278.968.500	Pengurangan volume belanja
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	6.677.000	14.677.000	Penambahan volume belanja
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	1 Paket	66.679.000	59.923.750	Pengurangan volume belanja
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	7.200.000	7.200.000	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	9.000.000	9.000.000	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	329.688.000	443.092.000	Pengurangan volume belanja
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Diadakan	100%	100%	266.734.000	310.725.000	
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	62	300.000.000	300.000.000	Renovasi Ruang Rapat dan Ruang Kantor
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	2 Unit	266.734.000	10.725.000	Pengurangan Belanja Meja Kerja dan Kursi Kerja
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	143.302.880	35.452.640	

NO.	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)/ SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		RENJA 2024	RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA 2024		RENJA 2024	RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA 2024	RENJA 2024	RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Daerah							
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	11.916.000	1.080.000	Pengurangan volume belanja
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	2 Laporan	1 Laporan	131.386.880	34.372.640	Pengurangan volume belanja
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terlaksana	100%	100%	218.740.000	177.430.000	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	39.780.000	43.540.000	Penambahan jumlah koefisien belanja
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	4 Unit	140.100.000	117.870.000	Pengurangan volume belanja
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	72 Unit	72 Unit	38.860.000	16.020.000	Pengurangan volume belanja
		Program Kepegawaian	Program Kepegawaian	Persentase ASN Yang Memiliki Kualifikasi Pendidikan DIV/S1 Ke Atas; Persentase Kasus Disiplin ASN Yang Ditindaklanjuti; Persentase Pemutakhiran Data ASN Dan Data Penempatan ASN.	72,62% 100% 92,35%	72,62% 100% 92,35%	2.305.182.000	2.166.579.000	

NO.	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)/ SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		RENJA 2024	RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA 2024		RENJA 2024	RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA 2024	RENJA 2024	RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Pemutakhiran Data ASN Dan Data Penempatan ASN	91,35%	91,35%	1.112.653.000	675.398.000	
		Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	968.573.000	531.318.000	Belanja Sewa Komputer CAT dibatalkan
		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	144.080.000	144.080.000	
		Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Penempatan ASN sesuai dengan Kompetensinya	91,35% 93,15%	91,35% 93,15%	404.589.000	404.589.000	
		Pengelolaan Mutasi ASN	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	15.755.000	15.755.000	
		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2 Dokumen	2 Dokumen	137.761.000	137.761.000	
		Pengelolaan Promosi ASN	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	5 Dokumen	5 Dokumen	251.073.000	251.073.000	
		Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN Yang Memiliki Kualifikasi Pendidikan D-IV/S-1 Ke Atas	73,17%; 72,76%	73,17%; 72,76%	664.091.000	781.660.000	
		Pengelolaan Assessment Centre	Pengelolaan Assessment Centre	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assesment Center	5 Dokumen	5 Dokumen	253.203.000	361.660.000	Penambaha volume belanja
		Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	5 Orang	5 Orang	253.203.000	420.000.000	Penambaha volume belanja
		Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Kasus Disiplin ASN Yang Ditindaklanjuti	100%	100%	305.908.000	304.932.000	

NO.	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)/ SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		RENJA 2024	RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA 2024		RENJA 2024	RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA 2024	RENJA 2024	RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Laporan	1 Laporan	51.898.000	51.898.000	
		Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	18 Orang	18 Orang	198.006.000	197.030.000	Pengurangan volume belanja
		Pembinaan Disiplin ASN	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	55 Orang	55 Orang	56.004.000	56.004.000	
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Pegawai Yang Memiliki Sertifikasi Sesuai Dengan Jabatan Dan Kompetensinya; Persentase Pegawai Yang Memiliki Sertifikasi Sesuai Dengan Jabatan Dan Kompetensinya	76,45%; 65,59%	76,45%; 65,59%	4,542.562.001	5.265.769.000	
		Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase Pegawai Yang Memiliki Sertifikasi Sesuai Dengan Jabatan; Kompetensinya	76,45%; 65,59%	76,45%; 65,59%	983.826.000	3.321.981.000	
		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	400 Orang	400 Orang	983.826.000	3.321.981.000	Penambaha volume belanja
		Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Pegawai Yang Memiliki Sertifikasi Sesuai Dengan Jabatan Dan Kompetensinya	65,59%		3.558.736.001	1.943.788.0000	
		Penyelenggaraan Pengembangan	Penyelenggaraan Pengembangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan	2 Laporan	2 Laporan	3.558.736.001	1.943.788.000	Pengurangan rekening

NO.	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)/ SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		RENJA 2024	RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA 2024		RENJA 2024	RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA 2024	RENJA 2024	RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan					belanja
TOTAL								20.836.484.651	21.700.841.375

3.3. Rencana Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan

Perubahan Rencana Kerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis, yang diwujudkan dalam Perubahan Renja beberapa kegiatan yang terbagi lagi menjadi beberapa sub kegiatan. Perubahan Renja BKPSDM Kota Batam tahun 2024 berupa program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah program yang menjadi kewenangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan bagi Perangkat Daerah lain, meliputi pelaksanaan fungsi perencanaan, keuangan, kepegawaian, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan. Untuk BKPSDM Batam masuk pada kewenangan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. Program ini disusun untuk meningkatkan semangat pengabdian yang berorientasi pada aspek pelayanan, pengayoman, pengembangan partisipasi masyarakat dan meningkatkan pengetahuan keahlian yang berkesinambungan dan membentuk kepribadian PNS dalam menjalankan tugas sehari-hari. Pendanaan kegiatan pada program ini menggunakan dana APBD Kota Batam melalui kegiatan:

1) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari sub kegiatan :

a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

Sub kegiatan ini terdiri dari belanja pegawai dari gaji dan tunjangan PNS serta tambahan tunjangan penghasilan PNS dan penyediaan belanja honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan (pembantu bendahara pengeluaran dan pengurus barang), pejabat pengadaan barang/jasa. Dengan adanya sub kegiatan ini akan meningkat semangat pengabdian untuk menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

2) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari sub kegiatan :

a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

Sub kegiatan ini merupakan belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat listrik

b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Sub kegiatan ini terdiri dari belanja operasi (belanja barang dan jasa) serta belanja modal (belanja modal peralatan dan

mesin). Dengan terlaksananya kegiatan ini akan menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

- a. Sub Kegiatan Penyediaan bahan Logistik Kantor.

Sub kegiatan ini terdiri dari dan belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor benda pos (materai) selama 1 tahun dan belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih.

- b. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.

Sub kegiatan ini merupakan penyediaan barang cetak dan penggandaan keperluan kantor selama 1 tahun.

- c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.

Sub kegiatan ini merupakan kegiatan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan selama 1 tahun seperti koran/majalah dan buku.

- d. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu.

Sub kegiatan ini merupakan penyediaan belanja konsumsi untuk kunjungan tamu pada BKPSDM Kota Batam.

- e. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Sub kegiatan ini merupakan perjalanan dinas bagi pegawai di BKPSDM Kota Batam dalam rangka menunjang penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD ke dalam maupun ke luar daerah.

- 5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari sub kegiatan :

- a. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel.

Sub kegiatan ini merupakan pengadaan barang milik daerah berupa belanja modal.

- b. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Sub kegiatan ini merupakan pengadaan barang milik daerah berupa belanja modal.

- 6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari sub kegiatan :

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

Sub kegiatan ini merupakan penyediaan jasa surat menyurat berupa pengiriman berkas atau dokumen untuk keperluan kantor.

- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Sub kegiatan ini adalah penyediaan jasa tenaga pelayanan umum kantor seperti tenaga honorarium kontrak.

7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari sub kegiatan :

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

Sub kegiatan ini merupakan penyediaan untuk jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan untuk mobil kepala badan selama 1 (satu) tahun.

- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas operasional atau Lapangan.

Sub kegiatan ini merupakan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan untuk kendaraan dinas sebanyak 4 unit selama 1 (satu) tahun.

- c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sub kegiatan ini merupakan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya untuk keperluan kantor selama 1 (satu) berupa pemeliharaan komputer, printer, laptop, acces door, dan lain-lain.

2. Program Kepegawaian Daerah

Program Kepegawaian daerah adalah merupakan program melaksanakan administrasi kepegawaian daerah pada prinsipnya terdiri dari; penyiapan peraturan daerah di bidang kebijaksanaan teknis kepegawaian, kemudian penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan, penetapan gaji, tunjangan, kesejahteraan dan pemberhentian PNS Daerah serta pengelolaan sistem informasi kepegawaian daerah dan menyampaikan setiap informasi kepegawaian daerah kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam hal ini Wali Kota. Semua fungsi tersebut harus sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. Materi yang boleh diatur hanya mengenai kebijaksanaan teknis kepegawaian daerah, sehingga tidak akan terjadi perbedaan dalam menetapkan norma, standar dan prosedur kepegawaian yang pada akhirnya dapat diciptakan kualitas PNS yang seragam di seluruh Indonesia. Pendanaan kegiatan pada program ini menggunakan dana APBD Kota Batam melalui kegiatan:

- 1) Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN, terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis, dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN.

Sub kegiatan ini merupakan penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN, baik itu Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kota Batam. Sehingga dengan terlaksananya sub kegiatan ini akan terpenuhinya kebutuhan ASN pada Pemerintah Kota Batam.

- b. Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian.

Sub kegiatan ini merupakan pengelolaan aplikasi SIMPEG yang ada pada BKPSDM Kota Batam, berupa kegiatan pengembangan aplikasi terhadap fitur-fitur aplikasi secara mandiri maupun mendatangkan tenaga ahli dalam rangka pengembangan dan penyempurnaan aplikasi tersebut.

- 2) Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN, terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN.

Sub kegiatan ini merupakan pengelolaan mutasi ASN terhadap jabatan struktural, fungsional dan pelaksana di lingkungan Pemerintah Kota Batam. Kebijakan mutasi jabatan dilakukan sesuai dengan kebutuhan organisasi atau kebutuhan pelayanan publik. Profesionalisme dalam tugas dan tanggungjawab menjadi pegangan bagi Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah, dengan berkoordinasi dengan Baperjakat dalam merumuskan dan mempertimbangkan pelaksanaan mutasi jabatan di lingkup Pemerintah Kota Batam.

- b. Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN.

Sub kegiatan ini merupakan pelayanan Aparatur Sipil Negara dalam mengurus kenaikan pangkat, ujian dinas dan penyesuaian ijazah.

- c. Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN.

Sub kegiatan ini merupakan pemenuhan kebutuhan pejabat yang mengalami promosi jabatan, diantaranya yaitu salah satunya untuk pengelolaan promosi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

- 3) Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN, terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Sub Kegiatan Pengelolaan *Assessment Center*.

Assessment bisa diartikan sebagai suatu proses pengumpulan

informasi mengenai seseorang yang mencakup kualitas dan kuantitasnya. *Assessment* sebenarnya dibutuhkan untuk membuat keputusan karena kegiatan *Assessment* dapat menghasilkan informasi yang lebih akurat dan dapat diandalkan. Selain itu, *Assessment* juga penting dilakukan guna menunjang keputusan-keputusan seperti penyaringan & diagnosis, evaluasi & intervensi, dan juga riset.

b. Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN.

Sub kegiatan ini merupakan peningkatan kompetensi aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Batam terutama dalam hal peningkatan kualifikasi pendidikan dengan melalui pengiriman tugas belajar bagi ASN.

4) Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :

a. Sub Kegiatan Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur.

Sub kegiatan ini merupakan monitoring evaluasi terhadap penilaian kinerja ASN Pemerintah Kota Batam.

b. Sub Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai.

Sub kegiatan ini merupakan pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai yang disiplin, berprestasi dan berkinerja baik serta berdedikasi tinggi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai ASN yang profesional.

c. Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN.

Sub kegiatan ini merupakan pembinaan terhadap para ASN yang mengalami berbagai permasalahan kepegawaian dan rumah tangga, sehingga dengan adanya sub kegiatan ini ASN akan diarahkan untuk lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab agar adanya peningkatan kemampuan pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui tugas pokok dan fungsinya.

3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Reformasi birokrasi pada pemerintahan pada gilirannya akan berdampak pada tuntutan kualifikasi atau kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam lembaga pemerintah. Dalam hal ini, pengembangan sumber daya manusia aparatur di sektor pemerintahan pada masa kini dan pada masa yang akan datang harus diarahkan kepada penataan kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya.

Peningkatan daya saing sumber daya manusia (SDM) aparatur dapat dilakukan melalui pengembangan standar kompetensi tersebut. Oleh karena itu segala kemampuan pemerintah saat itu harus diarahkan kepada upaya-upaya yang sistematis dan terencana untuk mencoba membangun standar kompetensi yang profesional. Pendanaan kegiatan pada program ini menggunakan dana APBD Kota Batam melalui kegiatan:

- 1) Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis, terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum.
Sub kegiatan ini merupakan penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis umum, inti dan pilihan bagi jabatan administrasi baik untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional maupun melalui pengiriman peserta Diklat keluar daerah.
- 2) Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional, terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan.
Sub kegiatan ini merupakan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama untuk Eselon II, sertifikasi untuk pejabat fungsional yang akan menduduki Jabatan Fungsional, Diklat Kepemimpinan baik untuk Eselon II, III, dan IV, dan Prajabatan bagi CPNS yang telah memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS.

BAB IV PENUTUP

Perubahan Renja BKPSDM Kota Batam, sesuai dengan sifatnya adalah dokumen penyesuaian perencanaan pada pertengahan tahun sebagai landasan operasional program dan kegiatan BKPSDM Kota Batam hingga akhir tahun. Isi dari Perubahan Renja lebih memusatkan seluruh perencanaan pembangunan pada arah dan tujuan jangka pendek dan mendukung sebagian arah pembangunan jangka menengah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis BKPSDM tahun 2021-2026. Dalam pelaksanaannya, dokumen ini harus dimanfaatkan secara efektif dan efisien, serta perlu disosialisasikan pada semua fungsi stake holder yang terkait untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaannya. Dengan demikian, Perubahan Renja BKPSDM Kota Batam tahun 2024 harus dapat berfungsi sebagai :

1. Pedoman dan acuan dasar yang secara konsisten diimplementasikan dalam penyusunan Kegiatan BKPSDM Kota Batam tahun 2024 baik dalam lingkup program maupun kegiatan serta sub kegiatan;
2. Roadmap kolaborasi dan integrasi dalam pelaksanaan kegiatan di BKPSDM Kota Batam untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan bersama;
3. Landasan bagi perencanaan pembangunan tahap selanjutnya untuk arah yang lebih baik lagi.

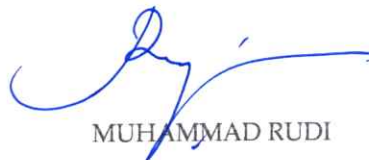
Peran serta maksimal dari seluruh bidang maupun sekretariat sebagai penunjang pelaksanaan bidang dalam memberikan pelayanan bidang kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan dalam rangka penyusunan rencana ini mutlak diperlukan, sehingga peran dan tanggung jawab bidang dan sekretariat dapat terakomodasi. Harapannya rencana kerja ini dapat mendorong peningkatan kinerja pelayanan BKPSDM Kota Batam kedepannya.

Perubahan Renja BKPSDM Kota Batam tahun 2024 ini berisikan kebijakan, strategi, program, dan kegiatan-kegiatan pembangunan dan pengembangan urusan kepegawaian dan pendidikan pelatihan bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Batam dan Pegawai lainnya yang menginginkan pelayanan seperti pindah baik mutasi masuk ke Pemerintah Kota Batam maupun sebaliknya mutasi keluar dari Pemerintah Kota Batam.

Dengan terlaksananya kegiatan prioritas tersebut diharapkan BKPSDM Kota Batam dapat mewujudkan aparatur pemerintah yang handal, profesional, bermoral dan modern yang selaras dengan Visi Kota Batam yaitu “Terwujudnya Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Moderen dan

Sejahtera”, dengan tema “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Melanjutkan Pembangunan Menuju Bandar Dunia Madani Yang Modern dan Sejahtera”. Sedangkan BKPSDM Kota Batam termasuk pada Prioritas Pembangunan yaitu “Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat” dengan Fokus “Pemberian Sanksi dan Penghargaan Terhadap Kinerja Aparatur serta Peningkatan Disiplin, Kualitas Kerja, Dan Kompetensi Aparatur Pelayanan Publik Melalui Pendidikan dan Pelatihan”. Hal ini terwujud dengan adanya “Program Kepegawaian Daerah dan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia”.

WALI KOTA BATAM

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'M' followed by a horizontal line that curves upwards at the end.

MUHAMMAD RUDI